

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN HARD INFRASTRUKTUR DESA KENDURUAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

Ika Ardilla Ramadani¹, Khumaidi²

^{1,2}Universitas Yudharta Pasuruan

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Korespondensi: Email :

lkaardilla0727@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam Pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Kenduruan, Sukorejo, Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam Pembangunan hard infrastruktur sudah berperan pada peran regulator, dinamisator, fasilitator, namun masih belum berperan di peran katalisator. Partisipasi masyarakat dan sarana pra-sarana dalam proses pembangunan menjadi faktor pendukung, serta yang

menjadi faktor penghambat yaitu kondisi cuaca yang tidak menentu serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kesimpulannya, pemerintah Desa Kenduruan mampu menjalankan perannya dalam Pembangunan hard infrastruktur, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang lebih optimal. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangasih wawasan tentang kajian peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: Hard Infrastruktur, Pemerintah Desa, Peran

ABSTRACT

This study aims to find out the role of the village government in the development of hard infrastructure in Kenduruan Village, Sukorejo District, as well as what are the supporting and inhibiting factors in the development of hard infrastructure in Kenduruan Village, Sukorejo District. The research method used is qualitative descriptive by taking the research location in Kenduruan Village, Sukorejo, Pasuruan. The results of the study show that the village government in the development of hard infrastructure has played a role in the role of regulators, dynamists, facilitators, but still has not played a role in the role of catalyst. Community participation and pre-facilities in the development process are supporting factors, as well as factors. The obstacles are erratic weather conditions and lack of coordination with related parties. In conclusion, the Kenduruan Village government is able to carry out its role in hard infrastructure development, although there are still several obstacles that need to be overcome to achieve more optimal development. The results of this study can contribute insight into the study of the role of village government in infrastructure development.

Keywords: Hard Infrastructure, Village Government, Role

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai bentuk pengelola pemerintah yang paling dekat dengan Masyarakat, dan dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan perannya yang hampir menyentuh segala aspek dan kegiatan masyarakat. Pemerintah desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak lepas dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintah desa adalah unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk memastikan keberhasilan semua program. Pemerintah desa merupakan pemberi pelayanan terbaik di desa karena memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan yang memenuhi standar. Pemerintah desa juga merupakan pemberi infrastruktur terbaik di desa karena mereka memiliki tugas dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur desa.

Pembangunan menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto (1993: 8), menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi lain, yang di pandang lebih baik (Sarah Simbolon dkk et al., 2021).

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, suatu desa dipimpin oleh kepala desa serta dibantu oleh perangkat desa yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa, dan melaksanakan Pembangunan Desa. Salah satunya Pembangunan infrastruktur.

menurut (Grigg, 1988) yang dikutip oleh (Posumah, 2015) Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, drainase, bangunan dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam kategori infrastruktur, Infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu infrastruktur fisik (hard dan infrastruktur lunak (soft). Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah hard infrastruktur atau infrastuktur keras, tetapi mencakup berbagai jenis pekerjaan konstruksi yang dapat dikategorikan sebagai infrastruktur keras. Secara umum, infrastruktur keras yang termasuk dalam cakupan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 mencakup Jalan dan Jembatan, Jaringan kereta api, Bandara, Pelabuhan, Sistem air bersih dan sanitasi, Bangunan sipil, Jaringan energi, Jaringan telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur di desa sangat berarti bagi Masyarakat karena memiliki manfaat langsung secara mendalam untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat maupun membantu pengembangan ekonomi desa. Dalam proses pembangunan di desa tidak hanya mengandalkan pemerintah saja tetapi juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Dalam pembangunan infrastruktur di desa, tentunya ada beberapa kendala yang menghambat proses pembangunan maupun pengelolaan Pembangunan seperti keterbatasan anggaran pemerintah desa dalam pembangunan fasilitas desa, kondisi desa yang masih belum melepaskan ketergantungan terhadap pemerintah daerah atau pusat serta dampak perubahan iklim di desa. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam pembangunan hard infrastruktur sangat penting dan merupakan kewajiban, karena menyediakan prasarana yang baik merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat desa.

Kata peran atau *role* dalam kamus oxforddictionary diartikan “ *Actor’s part*”, *One’s task or function* ” yang berarti *actor*; tugas seseorang atau fungsi. Dalam sebuah Pembangunan dibutuhkannya peran pemerintah desa agar Pembangunan terlaksana dan juga partisipasi Masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Tentunya Dalam keberhasilan sebuah pembangunan banyak faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah tersebut.

Di Desa Kenduruan dalam hard infrastruktur dari jenis infrastruktur berupa jalan, Jenis kerusakan yang terjadi terdapat di Jalan Dusun Mengeng dan Dusun Romacan adalah rusak parah, permukaan jalan retak, berlubang dan bahkan ada beberapa bagian dari jalan tersebut yang tidak dapat dilalui dengan aman. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jalan antara lain air, fluktuasi suhu, kondisi cuaca, serta majeriah jalan yang telah mengalami penuaan. Dalam postingan facebook akun Farid Hidayatulloh di grub Sukorejo pintar pada tahun 2022 sudah mengeluh tentang jalan yang memprihatinkan, bahkan pada tahun 2024 dalam postingan akun Maz Ketceh juga mengaploud foto tentang kondisi jalan yang rusak di Dusun Mengeng. Kedua, bukan hanya jalan yang rusak tapi kurangnya lampu jalan sebagai penerang di jalan bahkan Masyarakat disana juga sering mengeluhkan tentang lampu jalan itu, tetapi pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut.

Oleh karena itu, peneliti berusaha melakukan penelitian tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan. Menurut Ryaas Rasyid dalam (Suharto, 2023) bahwa peran pemerintah dibagi menjadi Empat jenis dalam indikator peran yaitu regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Hard Infrastruktur Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini akan menjawab permasalahan yang ditemukan yaitu Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan dan apa yang menjadi faktor pendukung serta menjadi faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam pembangunan hard infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan hard infrastruktur dan untuk mengetahui apakah faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam Pembangunan Hard Infrastruktur di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Definisi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah serangkaian tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat serta harus dilaksanakan. Sedangkan istilah peran atau *role* dalam kamus oxforddictionary diartikan “*Actor’s part*”, *One’s task or function*” yang berarti *actor*; tugas seseorang atau fungsi.

Menurut Friedman (2017: 286) dalam (Nunu, n.d.) mengemukakan bahwa: ‘Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Sementara itu, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) dalam konteks tertentu. Kemudian pengertian Peran menurut (Soekanto, 2002) yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan.



Pada hakikatnya peran adalah suatu konsep yang kompleks dan dinamis, melibatkan hak, kewajiban, dan pengharapan yang diharapkan dari individu dalam suatu posisi sosial. Menurut Ryass Rasyid dalam (Suharto, 2023) peran terdiri dari Empat indikator yaitu:

1. Peran Regulator, Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan.
2. Peran Dinamisator, Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi multi seperti pihak Masyarakat dalam rangka percepatan untuk pencapaian tujuan.
3. Peran Fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan Masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan.
4. Peran Katalisator, Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu menciptakan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat Pembangunan, mengatasi hambatan, dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai terkait.

Jadi, dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerinta desa dalam pembangunan hard infrastruktur dengan menggunakan empat teori peran ini.

Definisi Pembangunan

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah menyatakan bahwa pembangunan memiliki banyak pengertian dari pandangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, begitu pula antara suatu tempat dengan suatu yang lainnya, antara satu negara dengan negara yang lain. Namun, secara umum, ada kesepemahaman bahwa Pembangunan dipahami sebagai suatu metode untuk menciptakan perubahan (Adelia, 2022).

Saul M. Katz dan Tjokrowinoto (1993: 8) dalam (Sarah Simbolon dkk et al., 2021) mendefinisikan bahwa pembangunan adalah pergeseran proses peralihan dari satu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi yang lain, yang dipandang menjadi lebih baik. Sedangkan, menurut S.P Siagian (2008:40) dalam (Stefly N.D Mulalinda et al., 2021) Pembangunan adalah upaya atau rangkaian perubahan yang dilakukan secara sengaja dan terencana oleh sebuah bangsa, negara, dan pemerintah.

Pendapat-pendapat tersebut mencapai kesimpulan bahwa pembangunan memiliki berbagai definisi dan interpretasi yang bergantung pada pandangan individu, lokasi, dan negara. Namun, secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha atau metode untuk menghasilkan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik.

Definisi Infrastruktur

Infrastruktur mencakup semua fasilitas dan struktur dasar, baik fisik maupun sosial, yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi, industri, dan kegiatan sosial lainnya. Larimer (1994) dalam (Cut Nanda Kesuma & Suriyani, 2015) menyatakan bahwa infrastruktur adalah pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas, dan institusi yang berperan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan berbagai jenis infrastruktur yang diatur oleh pemerintah termasuk infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air

minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah hard infrastruktur atau infrastuktur keras, tetapi mencakup berbagai jenis pekerjaan konstruksi yang dapat dikategorikan sebagai infrastruktur keras. Secara umum, infrastruktur keras yang termasuk dalam cakupan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 mencakup Jalan dan Jembatan, Jaringan kereta api, Bandara, Pelabuhan, Sistem air bersih dan sanitasi, Bangunan sipil, Jaringan energi, Jaringan telekomunikasi.

3. METODE

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. John Creswell (2008) dalam (Prof. Dr. Conny R. Semiawan, 2010) mengartikan bahwa penelitian suatu proses yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Sedangkan metode kualitatif menurut Creswell (2008) dalam (Prof. Dr. Conny R. Semiawan, 2010) metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena utama.

Peneliti menggunakan model kualitatif ini, dilakukan untuk mencari informasi mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Kenduruan Kecamatan Sukrejo, Kabupaten Pasuruan, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah desa kenduruan dalam Pembangunan hard infrastruktur dengan menggunakan teori peran Ryaas Rasyid. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam Pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Adapun sebab peneliti mengambil penelitian dilokasi ini karena keinginan peneliti terkait penelitian pada fokus Peran Pemerintah Desa Kenduruan dalam Pembangunan hard infrastruktur Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik yang diterapkan oleh peneliti dalam pengumpulan data meliputi metode penelitian berikut:

1. Observasi, Observasi menurut Riyanto (2001) dalam (MSi et al., 2020) menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan subjek penelitian atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, disertai dengan pencatatan mengenai kondisi atau perilaku objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi terhadap Hard Infrastruktur Desa dengan cara berkunjung langsung ketempat penelitian, dan peneliti melakukan observasi terhadap fenomena permasalahan, RPJM dan RKP desa, dan fenomena yang terjadi di lapangan yang mendukung hasil penelitian ini.
2. Wawancara, Wawancara adalah interview. Selama observasi, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi ayng tidak didapat melalui observasi. Nadzir (1999) dalam (MSi et al., 2020) memberikan pengertian wawancara adalah proses pengumpulan

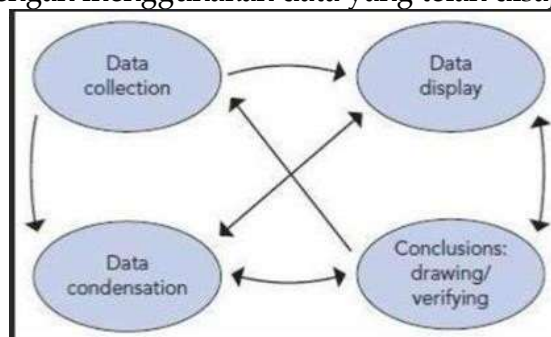
informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, dengan menggunakan interview guide. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik wawancara dengan sumber terkait, yaitu kepala desa dan perangkat desa.

3. Dokumentasi, Studi dokumentasi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari berbagai dokumen atau sumber informasi tertulis. Menurut Yulianto Kadji (2016), dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Ilmu Administrasi" bahwa : "Studi dokumentasi yaitu Penjajakan, inventarisasi dan validasi dokumen yang relevan dengan fokus subfokus penelitian yang seharusnya dilakukan oleh peneliti agar pada pelaksanaan tahapan penelitian berlangsung dengan dukungan dokumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan" (Yulianto Kadji, 2016).

Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman dalam buku (*Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. Intro*, 2018) Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Peneliti menggunakan metode berikut untuk menganalisis data:

1. Kondensasi Data, Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabsraksikan, dan mengubah data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan materi yang empiris.
2. Penyajian Data, Penyajian data dalam penelitian analisis data kualitatif merupakan proses membuat deskripsi naratif dari data yang disusun dari hasil reduksi.
3. Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan oleh peneliti dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan sejak awal penelitian, seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, serta alur sebab akibat, proses ini berakhir dengan menyimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.
4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions), Tahapan terakhir selanjutnya dalam analisis data menurut (Miles et al., 2014) yaitu proses analisis data, yang mencakup penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan data yang telah disajikan sebelumnya.



Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Miles, Huberman, Saldana (2014:11)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Desa Kenduruan

Desa Kenduruan adalah salah satu dari 19 Desa yang terletak di wilayah administrasi di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam dokumen pada profil Desa Kenduruan, Wilayah Desa Kenduruan berada di dataran rendah dengan kordinat antara 7.6658251,112.7156603 dengan luas 354.705 ha, dengan batas wilayahnya, sebagai berikut:

1. Utara : Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo
2. Timur : Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo
3. Selatan : Desa Kalirejo Kecamatan Sukorejo
4. Barat : Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo

Pusat pemerintahan Desa Kenduruan terletak di Dusun Kenduruan RT 01 RW 01 dengan menempati areal lahan seluas 150 M². Wilayah Desa Kenduruan terdiri dari 5 dusun, 7 RW dan 19 RT, yang membentuk srtuktur administrasi desa.

Pembahasan

Pemerintah desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak lepas dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Undang Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang dan tugas tentang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa juga Pembangunan Desa. Dan salah satu tugas itu melaksanakan Pembangunan desa termasuk infrastruktur desa.

Pembangunan infrastruktur tentunya berbeda di setiap desa, hal ini disesuaikan dengan kondisi seperti apa yang dibutuhkan pada desa tersebut. Dalam perencanaan program pembangunan serta pelaksanaan pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan telah di sesuaikan dengan kondisi lingkungan di desa. Sehingga pelaksanaan Pembangunan hard infrastruktur tersebut berdampak terhadap kemajuan desa.

Di Desa Kenduruan dalam jenis infrastruktur berupa jalan pada Dusun Romacan dan Dusun Mengeng terdapat kerusakan jalan yang dikategorikan parah, permukaan jakan retak, berlubang dan bahkan ada beberapa bagian dari jalan tersebut yang tidak dapat dilalui dengan aman. Setelah melakukan observasi lebih lanjut ternyata jalan tersebut sudah rusak di bebrapa tahun terakhir dan tidak sedikit masyarakat yang mengeluh tentang jalan tersebut baik secara langsung maupun di sosial media. Oleh karena itu, peran dari pemerintah desa dalam pembangunan sangat dibutuhkan dimana pemerintah memiliki kemampuan untuk merencanakan dan membuat regulasi untuk melakukan pengawasan agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana dan tidak merusak lingkungan.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Hard Infrastruktur Desa Kenduruan.

A. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Regulator pada peran regulator pemerintah desa dalam pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo ini pemeritah desa sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan ini memiliki hak dan wewenang untuk membentuk atau merencanakan regulasi terkait pembangunan serta membuat peraturan yang bisa mendukung terlaksananya pembangunan. Sebagaimana dijelaskan pada undang-



undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang tentang Pembangunan desa salah satunya yang termasuk juga pembangunan hard infrastruktur.

Dalam implementasinya di lapangan, pemerintah desa Kenduruan dalam pembuatan regulasi seperti perencanaan terkait pembangunan hard infrastruktur sudah di rencanakan dengan baik. Pemerintah desa membuat perencanaan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan melalui rapat musrenang yang melibatkan masyarakat, tokoh di desa dan pemangku kepentingan lainnya dan di tetapkan pada Rencana RPJM desa atau RKP desa. Tentunya, dalam hal ini pemerintah desa sudah merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak.

Mengenai penerbitan peraturan-peraturan yang dapat mendukung pembangunan agar lebih terarah seperti contoh pegawai yang terlibat dalam pembangunan harus menjaga dengan ketat keselamatan diri sendiri dan sebagainya, peraturan seperti itu masih belum di arahkan dengan baik oleh pemerintah desa. Dalam hal ini tentunya pemerintah desa sudah berperan dalam peran regulator.

B. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator sebagai penggerak partisipasi multi seperti pihak masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka untuk percepatan pencapaian tujuan dalam pembangunan. Dalam peran ini pemerintah desa harus menarik partisipasi masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.

Pemerintah desa Kenduruan dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator, pemerintah biasanya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pembangunan dan pembangunan apa serta dilaksanakan di dusun mana pembangunan tersebut dilaksanakan. Dalam kegiatan sosialisasi pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan seperti kegiatan musrenbang lalu pada saat akan dilaksanakannya kegiatan pembangunan pemerintah desa melakukan sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan. Terkadang juga disaat tidak terlaksananya sosialisasi karena adanya hal lain yang lebih mendesak, pemerintah desa memberi pemberitahuan melalui via whatsapp agar masyarakat tetap mengetahui bahwa akan adanya pelaksanaan pembangunan dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut baik ikut andil dalam kegiatan pembangunan atau sekedar membantu dalam konsumsi untuk pelaksana pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa Kenduruan sudah berperan sebagai dinamisator.

C. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi Dalam peran fasilitator pemerintah desa mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif terkait tentang pembangunan. Selain itu sebagai fasilitator, pemerintah desa bertanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembangunan hard infrastruktur. Pemerintah desa Kenduruan dalam peran fasilitator dalam perannya sudah memberi fasilitas untuk mendukung pembangunan seperti menyediakan tempat untuk melakukan musyawarah atau rapat terkait perencanaan pembangunan seperti musrenbang dan tempat untuk melakukan sosialisasi, juga alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan seperti cangkul, gerobak, dan alat-alat berat lainnya yang bisa disewa.

Tidak hanya itu dalam peran ini pemerintah desa juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif saat terlaksananya kegiatan pembangunan agar warga tidak merasa terganggu dengan adanya pembangunan sehingga warga bisa tetap melakukan kegiatan seperti sehari-harinya. Dalam hal ini pemerintah desa selain menyampaikan lewat sosialisasi biasanya menyampaikan berita via whatsapp agar warga tahu bahwa ada pembangunan yang dilaksanakan di dusun atau tempat tersebut selain bermaksud agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan juga agar warga tahu bahwa tempat tersebut sedang ada pembangunan dan warga tidak melintasi tempat tersebut dan langsung mencari jalan lain sehingga aktivitas warga tetap berjalan dengan lancar dan tidak menghambat aktivitas warga.

D. Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Di sebuah desa tidak semuanya aset baik pembangunan atau lainnya milik desa, ada juga pembangunan yang milik kabupaten atau juga pemerintah pusat. Seperti halnya jalan di dusun Mengeng dan dusun Romacan yang ternyata jalan tersebut milik kabupaten.

Dalam perannya sebagai katalisator pemerintah desa harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mengatasi hambatan, dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini pemerintah desa mempunyai tugas dalam mengatasi hambatan dalam pembangunan serta menjalin kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti kerja sama dengan pemerintah kabupaten atau pusat terkait pembangunan hard infrastruktur di desa tersebut.

Dalam peran katalisator pemerintah desa menyebutkan bahwasanya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah desa kenduruan memang sudah baik, namun terdapat perencanaan pada pembangunan hard infrastruktur milik kabupaten yang sampai saat ini masih mendapat hambatan karena masih tidak ada respon dari pihak terkait untuk perencanaan pembangunan jalan milik kabupaten di Desa Kenduruan ini, dimana ada letak kerusakan jalan pada dusun Romacan dan dusun Mengeng sesuai dengan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini. Diperkuat juga dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa memang jalan tersebut masih tidak ada tanggapan apapun dan masih belum dibenahi sampai sekarang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah desa kenduruan sebagai katalisator adalah keterbatasan dalam menjalin Kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk beberapa pembangunan infrastruktur yang optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

A. Faktor Pendukung

Ada beberapa yang menjadi faktor pendukung pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Kenduruan, sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor pendukung adalah partisipasi dari Masyarakat, dimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berperan penting dalam keberhasilan peran pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat saat pelaksanaan Pembangunan seperti Pembangunan yang sudah direncanakan harus selesai dalam waktu 1 bulan karena adanya bantuan dari Masyarakat Pembangunan tersebut bisa selesai dalam jangka waktu tersebut. Karena, dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan partisipasi Masyarakat sangat mendukung agar terwujudnya infrastruktur yang bagus.

2. Sarana Prasarana

Dalam pembangunan hard infrastruktur di desa Kenduruan sarana dan prasarana menjadi pendukung. Dimana dalam pembangunan hard infrastruktur di desa Kenduruan pemerintah desa mampu memberikan dan mendukung sarana prasarana. Pemerintah desa menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah yang memadai, alat perkakas dan sarana pra-saran lainnya untuk pembangunan. Pemerintah Desa Kenduruan terus berupaya menyediakan sarana dan pra-sarana untuk terlaksananya keberhasilan program pembangunan. Ketersediaan sarana dan pra-sarana memang penting karena dengan sarana pra-sarana yang memadai juga mampu menunjang kinerja pemerintah Desa Kenduruan agar bisa dilakukan dengan maksimal.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan hard infrastruktur di desa Kenduruan adalah :

1. Cuaca

Dalam pelaksanaan pembangunan cuaca tentunya juga menjadi hal yang penting karena cuaca yang bagus dapat memperlancar pembangunan. Dalam hal ini menurut pemerintah desa Kenduruan cuaca menjadi faktor penghambat karena terkadang saat ada pelaksanaan pembangunan cuaca yang tidak menentu dapat menghambat Pembangunan dan pembangunan diberhentikan sementara sehingga pelaksanaan pembangunan bisa selesai lebih lambat.

2. Kurangnya Koordinasi

Dalam pembangunan tentunya komunikasi dengan pihak kabupaten atau pihak terkait menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa Kenduruan masih kurang dalam hal berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dimana pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada akses milik kabupaten namun saat mengirim proposal ke pihak kabupaten terkait pembangunan tidak ada tanggapan dan faktor ini menjadi hambatan untuk melakukan pelaksanaan pembangunan yang pembangunan tersebut perlu adanya kerja sama dengan pihak kabupaten.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran pemerintah Desa dalam pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo dalam peran pemerintah desa sebagai regulator pemerintah desa sudah berperan, dalam peran ini pemerintah desa sudah menyiapkan arah terkait perencanaan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RPJM Desa serta membuat regulasi seperti penerbitan peraturan yang terkait dengan pembangunan. Namun, dalam penetapan peraturan-peraturan tidak ditulis dalam dokumen sehingga masih kurang kuatnya dokumen pendukung karena sebab menyebutkan peraturan-peraturan tersebut.

Pemerintah desa dalam perannya dalam pembangunan hard infrastruktur sebagai dinamisator di Desa Kenduruan sudah berperan, pemerintah desa sudah bergerak dan berupaya melakukan kegiatan untuk mendorong masyarakat dalam pembangunan dilakukan sosialisasi atau musyawarah. Dari sosialisasi tersebut pemerintah desa berhasil menggerakkan masyarakat

dan berpartisipasi dengan membantu dalam pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pemerintah desa sebagai peran fasilitator dalam Pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan dalam peran fasilitator ini pemerintah desa sudah berperan, dengan menyediakan fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan pembangunan seperti alat-alat yang digunakan untuk pembangunan. dengan diberitahunya masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan membuat masyarakat tidak terhambat dengan kegiatan sehari-hari, pemerintah desa juga mampu menciptakan lingkungan kondusif dan tidak mengganggu warga disaat terlaksananya pembangunan.

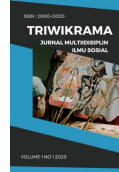
Pemerintah desa dalam peran katalisator dalam Pembangunan hard infrastruktur Desa Kenduruan masih belum bisa dikatakan berperan, karena dalam peran ini pemerintah desa Kenduruan mempunyai tanggung jawab untuk menjembatani kepentingan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk mempercepat pembangunan, namun, dalam peran ini pemerintah masih belum berhasil berkomunikasi dengan

pihak terkait yaitu pemerintah kabupaten, untuk melakukan pelaksanaan pembangunan hard infrastruktur yang dalam perencanaan untuk pembangunan milik kabupaten yang seharusnya pembangunan dilakukan kolaborasi bersama dengan pihak kabupaten. Jadi dalam peran ini pemerintah desa Kenduruan masih dikatakan masih belum berhasil karena terhambatnya kordinasi atau masih tidak adanya respon dari pihak terkait.

Yang menjadi Faktor pendukung pada peran pemerintah desa dalam Pembangunan hard infrastruktur di Desa Kenduruan ini diantaranya, faktor pendukung yang pertama, partisipasi Masyarakat, dengan adanya partisipasi dari pihak masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan hard infrastruktur Desa Kenduruan bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan. Kedua, ketersediaan prasarana untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Kenduruan membantu pemerintah desa menjalankan perannya. Sedangkan, Faktor yang menghambat peran pemerintah desa di dalam Pembangunan hard infrastruktur diantaranya, faktor pertama, cuaca yang terkadang tidak menentu dalam pelaksanaan Pembangunan. Kedua, terhambatnya koordinasi serta komunikasi dengan beberapa pihak kepentingan terkait yang menyebabkan terhambatnya Pembangunan.

Saran

1. Pemerintah Desa Kenduruan harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan dukungan yang memadai dalam Pembangunan hard infrastruktur.
2. Memanfaatkan teknologi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan hard infrastuktur, karena tekonologi dapat membantu dalam pemetaan kebutuhan, monitoring proyek, dan komunikasi antara pemerintah desa dengan Masyarakat serta pihak terkait lainnya.
3. Selain membangun infrastruktur yang baru, pemerintah Desa Kenduruan juga harus fokus pada proses pemeliharaan rutin seperti perbaikan jalan yang rusak dan perawatan fasilitas umum harus menjadi bagian program kerja desa untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas infratrstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. I. P. E. F. M. S. (2022). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Sonomartani Kabupaten Labuhan Batu Utara*. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i10.p08>
- Cut Nanda Kesuma, & Suriyani. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 4. <https://doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00>
- MSi, H., Ustiaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Nunu. (n.d.). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS*. www.sansjurnal.com
- Posumah. (2015). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. ejournal.unsrat.ac.id
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan. (2010). Metode Penelitian Kualitatif (PDFDrive). *Book. prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro*. (2018).
- Sarah Simbolon dkk, D., Sarah Simbolon, D., Sari, J., Yolanda Purba, Y., Indah Siregar, N., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). pdfs.semanticscholar.org
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Stefly N.D Mulalinda, Ismail Sumampow, & Alfon Kimbal. (2021). *Perencanaan Terpadu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO. Volume 1 No. 2*. ejournal.unsrat.ac.id
- Suharto, D. M. (2023). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (DUWET, BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN)*. 16(2). <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i2.9575>
- Yulianto Kadji. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. (p. 176)